

Bab I **Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

Sapi perah merupakan ternak yang menghasilkan susu sebagai produk utamanya dan memiliki sejarah panjang di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah mengenal sapi perah sejak akhir tahun 1800-an, khususnya pada masa kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sapi perah di Indonesia sudah ada lebih dari 135 tahun, dimulai dengan masuknya sapi Friesian Holstein yang terkenal produktifitas susunya. Pada tahun 1911, pertanian Peternakan sapi perah mulai berkembang di Nongkojajar, Pasuruan, saat Belanda mendirikan perusahaan pertanian untuk memenuhi kebutuhan susu mereka (Pasaribu et al., 2023).

Di daerah Nongkojajar, Pasuruan, peternakan sapi perah mulai berkembang pada tahun 1911. Saat itu, orang-orang Belanda yang tinggal di daerah tersebut membawa sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu mereka. Seiring berjalannya waktu, peternakan sapi perah tidak hanya menjadi usaha bagi penjajah tetapi juga mulai merambah ke kalangan masyarakat pribumi. Pada tahun 1964, diperkirakan berdiri koperasi pertama yang terbentuk adalah Koperasi Karya, yang kemudian bergabung dengan Koperasi Berdikari pada tahun 1966 untuk membentuk Pusat Koperasi Lembu Perah (PKLP) Setia Kawan. Koperasi ini terus berkembang dan di tahun 1977 berganti nama menjadi Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan (Suparyanto dan Rosad et al., 2020).

Seiring waktu, permintaan terhadap susu sapi perah di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Peternakan pada tahun 2020, konsumsi susu per kapita di negara ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, dengan rata-rata hanya sekitar 13 liter per orang setiap tahunnya. Ini menunjukkan adanya potensi pasar yang besar untuk produk susu lokal. Namun, baru-baru ini, kebijakan yang membatasi kuota penerimaan susu oleh

pabrik-pabrik di Indonesia, terutama di wilayah Nongkojajar dan Pasuruan, telah memberikan dampak yang signifikan bagi para peternak susu lokal. Kebijakan tersebut membatasi jumlah susu yang dapat diterima dari peternak, sementara permintaan pasar untuk susu lokal tidak sebanding dengan jumlah produksi yang ada. Sebagai ilustrasi, menurut Sulistyanto selaku Ketua KPSP Setia Kawan (11/11), sebelum dilakukan pembatasan kuota rata-rata pengiriman susu harian KPSP Setia Kawan bisa mencapai 97 ton per hari. Namun, setelah adanya pembatasan kuota tersebut menyebabkan kurang lebih 80 ton susu per hari tidak bisa disetorkan dan tertahan di penyimpanan koperasi, bahkan ada juga yang rusak dan pada akhirnya dibuang.

Dampak dari kebijakan ini juga mempengaruhi perekonomian lokal dengan menurunnya perputaran ekonomi di lingkungan para peternak sapi perah, karena pendapatan yang diterima oleh peternak sapi berkurang dari penjualan susu yang menurun. Selain itu, peternak sapi perah juga merasa dirugikan dan cemas akan keberlanjutan usaha peternakan di waktu yang akan datang (Galloway et al., 2013). Oleh sebab itu, perlu diadakan evaluasi dari kebijakan agar mendapatkan dukungan kelancaran usaha para peternak sapi perah dan meningkatkan kemakmuran peternak di daerah tersebut supaya kondisi ini tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ternak susu sapi yang sangat bergantung pada penghasilan dari pemasaran susu untuk keperluan sehari-hari peternak. (Andrade et al., 2017)

Konsekuensi dari kebijakan ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial. Peternak yang sebelumnya bergantung pada pendapatan dari penjualan susu kini terpaksa mencari alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam kondisi ini para peternak menjadi tidak puas serta frustrasi terhadap pemerintah dan industri pengolahan susu yang mulai kehilangan kepercayaan dari peternak. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan wawasan kepada pihak yang terdampak sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang bersifat menguntungkan dan mendukung keberlangsungan usaha peternak sapi perah di Nongkojajar Pasuruan.

Dengan demikian, memahami sejarah dan perkembangan peternakan sapi perah di Indonesia khususnya di Nongkojajar Pasuruan, serta tantangan yang dihadapi saat ini adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk susu yang berkualitas. Penelitian ini dipilih karena sangat relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Dampak kebijakan tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi seperti pendapatan atau keberlanjutan usaha ternak, tetapi juga aspek sosial seperti hubungan antar peternak sapi perah, motivasi kerja, dan persepsi terhadap pemerintah serta industri pengolahan susu yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi saat ini serta rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mendukung industri susu lokal dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apa saja dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pembatasan kuota penerimaan susu bagi peternak di Nongkojajar Pasuruan?
- b) Bagaimana persepsi peternak terhadap kebijakan tersebut?
- c) Bagaimana solusi yang diambil peternak untuk menanggapi kebijakan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pembatasan kuota penerimaan susu.
- b) Menganalisis persepsi peternak terhadap kebijakan tersebut.
- c) Menganalisis solusi yang diambil oleh peternak dalam menghadapi kebijakan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

- a) Pemahaman yang lebih baik mengenai dampak sosial dan ekonomi dari pembatasan kuota penerimaan susu pada peternak di Nongkojajar, Pasuruan.
- b) Mendorong peternak untuk membentuk jaringan atau organisasi yang lebih kuat, sehingga para peternak lebih siap dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi.
- c) Sebagai salah satu acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan industri susu sapi perah dan kebijakan pertanian.